

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

# RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN (RKT PERUBAHAN) TA. 2020

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 TELEPON (0532) 21195

### BAB I

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan unsur pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan salah satu perangkat daerah dari 38 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki luas wilayah 10.759 Km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 269.629 jiwa, terbagi dalam 6 (enam) kecamatan serta 81 Desa dan 13 Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabuapten Kotawaringin Barat, melaksanakan kerja sama dengan Instansi Vertikal sebanyak 4 (empat) buah instansi yaitu Kodim 1014 Pangkalan Bun, Polres Kotawaringin Barat, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, dan Sub Denpom Pangkalan Bun.

Perubahan status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perubahan nomenklatur sebagai pengganti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ditetapkannya lembaga ini sebagai perangkat daerah maka berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020 sebagai kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah terpilih berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah khususnya pada tahun 2020.

# BAB II

# VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 adalah *"Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas"* 

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat .

- 1. Maju pembangunan sesuai IPTEK dan INFRASTRUKTUR yang representative.
- 2. Masyarakat yang bermoral punya **KETAKWAAN** pada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3. Keberagaman masyarakat yang HARMONIS.
- 4. Interaksi dan pergaulan yang LANGGENG.
- 5. Keberadaan hidup yang AMAN.
- 6. Kehidupan masyarakat SEJHTERA, cukup pangan, sandang dan papan.

Adapun Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 terdiri dari 6 (enam) poin sebagai berikut .

- 1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
- 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
- Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
- 4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
- 5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman,tentram dan dinamis.
- 6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut maka dapat dirumuskan rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ada 2 (dua) strategi antara lain.

- 1. Dari perspektif masyarakat/layanan:
  - Strategi : Mengoptimalkan stakeholder yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.
- 2. Dari Perspektif kelembagaan :
  - Strategi . Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul.

#### **BAB III**

# TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat yang terpilih maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

#### A. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang telah disusun adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air.
- 2. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
- 3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.
- 4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

#### B. Sasaran

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Tujuan* diatas adalah sebagai berikut.

- 1. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 2. Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial
- 3. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
- 4. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
- 5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
- 6. Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional.

# C. Program

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan akan diuraikan sebagai berikut :

# a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan pembinaan karakter bangsa di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut:

- 1. Peningkatan rasa solidaritas ikatan sosial dikalangan masyarakat.
- 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

# b. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta pencegahan terjadinya konflik sosial. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut .

- 1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- 2. Pencegahan dan penanganan konflik sosial.

# c. Program pendidikan politik masyarakat

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan peran serta masyarakat, pemilih pemula dan para peserta pemilu (partai politik).Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut:

- 1. Penyuluhan kepada masyarakat
- 2. Forum-forum diskusi politik.

# d. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi memberikan pemahaman dan pembinaan kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan untuk peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Untukmelaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan berikut .

- 1. Pembinaan Ormas dan LSM.
- 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM.

#### BAB IV

# KEBUTUHAN DATA KINERJA

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 yang merupakan rencana tahunan SKPD disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA. 2020 dan beberapa sumber-sumber data dari dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), Adapun sumber-sumber data tersebut antara lain.

- 1. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2022.
- 2. Cascading Renstra Badan Kesbangpol Hasil Review Tahun 2019.
- 3. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.
- 4. Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2020.

# BAB V

# RENCANA KINERJA

# Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

- 1. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
- Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
- 3. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
- 4. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
- 5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
- 6. Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan professional.

Dari beberapa sasaran strategis diatas dapat dijabarkan menajdi beebrapa indikator kinerja yang merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 :

- 1. Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
- 2. Nilai SAKIP perangkat daerah
- 3. Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA
- 4. Prosentase penanganan konflik sosial
- 5. Prosentase fasilitasi pembinaan pendidikan politik didaerah
- 6. Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif

Adapun untuk target dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020, *Tabel Perubahan RKT dan Perubahan PK Terlampir*.

# PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja

# : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK KAB. KTW. BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat dae	pemenuhan kebutuhan	menuhan butuhan nunjang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	64.320.000
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 bulan	121.802.800
							Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan	42.000.000
							Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	8 unit/thn	6.720.000
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	40 jenis	27.039.250
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7 jenis	21.600.000
							Jumlah penggandaan yang disediakan	50200 lembar	
						1	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	5.474.950
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 buah	5.000.000
							Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	470 org/kali	7.050.000
						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	31 kali	135.000.000
						Total	436.007.000		
					a pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Manual Control of the		
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	12 buah	4.800.000
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-
						Pengadaan meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	7.500.000

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor  Total  Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara  Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara  Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat  Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 unit/thn 6 Unit 1 unit 1 orang/kali	17.000.000 3.950.000 100.000.000 133.250.000	
						Total			10.311.500
-	<u> </u>								
II	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,1 Nilai	ai Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-	
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	-	-
						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun disusun	1 laporan	20.500.000
				Total					20.500.000
III	bernuansa SAR	penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA	0 Kasus	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat (Sub Kegiatan : Penyuluhan FKUB dan FPK)	Jumlah peserta Penyuluhan/sosialisasi Pembauran Kebangsaan	-	
		agar tidak menjadi			terhadap masyarakat yang telah dibina	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat (Sub Kegiatan : Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Laporan kegiatan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	6 Laporan	146.860,000
				Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat (Sub Kegiatan : Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah laporan kegiatan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	6 Laporan	27.510.000		
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Sub Bagian : Peningkatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946	300 orang	71.665.000		

						Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Sub Bagian : Mengikuti Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB))	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB)	-	246.035.000
						1000			
IV	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	0%	Program Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Sub Kegiatan :Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Instansi Vertikal)	Jumlah patroli keamanan intansi vertikal (aparat keamanan daerah) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	36 Kegiatan	220.750.000
					menjaga kantramtibmas	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Sub Kegiatan : Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini	Jumlah kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	3 Kegiatan	20.025.000
						Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Sub Kegiatan : Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing).	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing)	-	-
						Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah	15 laporan	25.407.000
						Total		266.182.000	
V	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pembinaan pendidikan politik	100%	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemahaman politik masyarakat	Penyuluhan kepada masyarakat (Sub Bagian : Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat)	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	-	-
		didaerah				Penyuluhan kepada masyarakat (Sub Bagian : Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	42 Orang	40.650.000
						Forum-forum diskusi politik (Sub Bagian : Sosialisasi/Pelatihan penyusunan LPJ Banpol dan verifikasi laporan keuangan Partai Politik)	Jumlah peserta sosialisasi /pelatihan bantuan parpol dlm rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban parpol	-	-

						Forum-forum diskusi politik (Sub Bagian : Verifikasi Bantuan keuangan/hibah kepada Partai Politik)  Total	Jumlah kegiatan Verifikasi Bantuan keuangan/hibah kepada Partai Politik	-	40.650.000
VI	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Sub Bagian : Sosialisasi tentang Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan) Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Sub Bagian : Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya Masyarakat) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat dan Lembaga	Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi tentang Ormas/LSM  Jumlah kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya Masyarakat  Jumlah laporan hasil monev Ormas dan LSM	-	-
						Swadaya Masyarakat Total			1.152.935.500
Total Keseluruhan									

Pangkalan Bun, Oktober 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK KAB.KTW.BARAT

MARWOTO, SIP NIP. 19640428 198603 1 007 BAB VI

PENUTUP

Demikian Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2020 ini adalah sebagai wujud atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja sebagai alat pendorong terwujudnya

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, dapat mewujudkan target kinerja yang bertanggung jawab dan terarah guna menunjang pembangunan daerah.

good governance dan clean government.

Pangkalan Bun, Oktol

Oktober 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN KAB. KTW. BARAT

MARWOTO, SIP NIP. 19640428 198603 1 007